BAB II

STUDI PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Strategi

Strategi merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup dari suatu perusahan untuk mencapai sasaran atau tujuan perusahaan yang efektif dan efisien, perusahaan harus bisa menghadapi setiap masalah-masalah atau hambatan yang datang dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, dalam pengembangannya konsep mengenai strategi harus terus memiliki perkembangan dan setiap orang mempunyai pendapat atau definisi yang berbeda mengenai strategi.

Strategi dalam suatu dunia bisnis atau usaha sangatlah di butuhkan untuk pencapaian visi dan misi yang sudah di terapkan oleh perusahaan, maupun untuk pencapaian sasaran atau tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang.

Menurut David (2011:18-19) Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi georafis, diversifikasi, akusisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengetatan, divestasi, likuidasi, dan usaha patungan atau joint venture. Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Jadi strategi adalah sebuah tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan

oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah di tetapkan.

Menurut Tjiptono (2006:3) istilah strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategia yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jendral. Strategi juga bisa diartikan suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer pada daerah – daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Pearce II dan Robinson (2008:2), strategi adalah rencana berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuanPerusahaan dari definisi tersebut, dapat di simpulkan bahwa pengertian dari Strategi adalah sebuah tindakan proses perencanaan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan, dengan melalukan hal-hal yang besifat terus menerus sesuai keputusan bersama dan berdasarkan sudut pandang kebutuhan pelanggan.

Rangkuti (2013:183) berpendapat bahwa strategi adalah perencanaan induk yang komprehensif, yang menjelaskan bagaimana perusahaan akan mencapai semua tujuan yang telah di tetapkan berdasarkan misi yang telah di tetapkan sebelumnya.

Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert. Jr (2005), konsep strategi dapat di definisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda yaitu: (1) dari perspektif apa suatu organisasi ingin dilakukan (intens to do), dan (2) dari perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan (eventually does).

Dari definisi tersebut penulis menyimpulkan bahwa pengertian strategi adalah hal hal yang perusahaan/organisasi ingin lakukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya.

Dalam buku Analisis SWOT Teknis Membedah Kasus Bisnis, Rangkuti (2013:3-4) mengutip pendapat dari beberapa ahli mengenai strategi, di antaranya :

a) Chandler : Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya.
b) Learned, Christensen, Andrews, dan Guth : Strategi merupakan alat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dengan demikian salah satu fokus strategi adalah memutuskan apakah bisnis tersebut harus ada atau tidak.
c) Argyris, Mintzberg, Steiner dan Miner : Strategi merupakan respons secara terus-menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat memengaruhi organisasi.
d) Porter : Strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing.
e) Andrews, Chaffe : Strategi adalah kekuatan motivasi untuk stakeholders, seperti stakeholders, debtholders, manajer, karyawan, konsumen, komunitas, pemerintah, dan sebagainya, yang baik secara langsung maupun tidak langsung menerima keuntungan atau biaya yang ditimbulkan oleh semua tindakan yang dilakukan oleh perusahaan.

f) Hamel dan Prahalad : Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan pelanggan di masa depan. Dengan demikian, perencanaan strategi hampir selalu dimulai dari “apa yang dapat terjadi”, bukan dimulai dari “apa yang terjadi”. Terjadinya kecepatan inovasi pasar baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (core competencies). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.

Dari definisi-definisi di atas maka dapat di simpulkan bahwa strategi adalah alat untuk mencapai tujuan atau keunggulan bersaing dengan melihat faktor eksternal dan internal dari Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), sehingga melakukan tindakan yang dapat menjadikan keuntungan baik untuk TPAKD.

2. Kinerja

a. Defenisi Kinerja

Prawirosentono (1999) dalam sutrisno (201, h.170) mengemukakan kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Menurut Miner (1990), kinerja adalah bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Kinerja (performance) merupakan suatu

pencapaian persyaratan pekerjaan tertentu yang akhirnya secara nyata dapat tercermin keluaran yang dihasilkan. Kinerja merupakan salah satu alat ukur bagi pencapaian tujuan organisasi.

Hasibuan (2002) juga mengartikan Kinerja (prestasi kerja) sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Simmamora, 1995.h.327)

Swanson dan Graudous dalam Sutrisno, menjelaskan bahwa dalam sistem berapapun ukurannya, semua pekerjaan saling berhubungan. Hasil dari seperangkat kinerja pekerjaan adalah masukan bagi usaha kinerja lainnya. Karena saling bergantung, apa yang tampaknya merupakan perolehan kinerja yang kecil dalam suatu aspek pekerjaan dapat menghasilkan perolehan besar secara keseluruhan. Jadi, produktivitas suatu sistem bergantung pada kecermatan dan efisiensi perilaku kerja.

Gilbert (1978) berpendapat sebaliknya, bahwa kinerja pada dasarnya adalah produk waktu dan peluang. Peluang tanpa waktu untuk mengejar peluang tersebut bukan apa-apa. Dan waktu yang tidak kita miliki, yang tidak memberi peluang bahkan memiliki sedikit nilai.

b. Aspek Kinerja

Menurut T.R Michel dalam Rizky 2001:15 kinerja meliputi beberapa aspek diantaranya :

1) Kualitas Kerja *(Quality of Work),* yaitu kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya.

2) Ketepatan Waktu *(Promptness),* yaitu berkaitan dengan sesuai atau tidaknya waktu penyelesaian pekerjaan dengan target waktu yang direncanakan.

3) Inisiatif *(Initiative),*yaitu semangat untuk melaksanakan tugas-tugas dan dalam memperbesar tanggungjawabnya.

4) Kemampuan *(Capability),* yaitu diantara beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang, ternyata yang dapat diintervensi atau terapi melalui pendidikan dan latihan adalah faktor kemampuan yang dapat dikembangkang.

5) Komunikasi *(Communication),* yaitu interaksi yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan untuk mengemukakan saran dan pendapatnya dalam memecahkan masalah yang dihadapi.

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama.

Kinerja (prestasi kerja) merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai atau tim dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Umumnya, setiap organisasi sangat memperhatikan upaya pengoptimalan kinerja sumber daya manusia (SDM). Sehingga dalam hal ini, SDM menjadi faktor penentu bagi perusahaan dalam mencapai suatu kinerja yang baik.

c. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja didefenisikan sebagai monitoring dan pelaporan program berjalan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kinerja yang diukur dapat ditekankan pada jenis atau level program yang dijalankan (proses), produk atau layanan langsung yang dihasilkan (*output*), maupun hasil ataupun dampak dari produk atau layanan (*outcome*). Program yang dimaksud dapat berupa aktivitas, projek, fungsi atau kebijakan yang telah teridentifikasi tujuannya atau sasarannya.

Pengukuran kinerja adalah proses pengumpulan, analisis, dan/atau pelaporan informasi mengenai kinerja dari seorang individu, grup, organisasi, sistem atau komponen. Dalam proses ini, organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akuisisi yang dilakukan.

3. E-Government

E-government ialah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta penyediaan layanan informasi dari pemerintahan ke warganya (G2C), dan Bisnis (G2B), serta hubungan antar pemerintah (G2G). E-government berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti: wide area network, internet dan komunikasi bergerak) oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kemampuan untk mentransformasikan hubungan pemerintah dengan warganya, pelaku dunia usaha (bisnis), dan Lembaga pemerintah lainnya.

Teknologi ini dapat mempunyai tujuan yang beragam, antara lain: pemberian layanan pemerintahan yang lebih baik kepada warganya, peningkatan interaksi dengan dunia usaha dan industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi, atau manajemen pemerintahan yang lebih efisien. Hasil yang diharapkan dapat berupa pengurangan korupsi, peningkatan transparansi, peningkatan kenyamanan, pertambahan pendapatan dan/atau pengurangan biaya. Berdasarkan fakta yang ada pelaksanaan e-Government di Indonesia sebagian besar barulah pada tahap publikasi situs oleh pemerintah atau baru pada tahap pemberian informasi.

Fungsi e-government ialah untuk meningkatkan mutu dari pelayanan publik, dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi. Serta komunikasi di dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah agar bisa terbentuk kepemerintahan yang bersih, transparan serta agar bisa untuk menjawab tuntutan perubahan dengan efektif.

Tujuan e-government adalah memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik dan untuk berinteraksi dengan jajaran pemda, meningkatkan efisiensi, efektivitas dan accountability dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mendorong kerjasama antar lembaga pemerintah dan swasta secara interaktif untuk meningkatkan perekonomian sosial, serta membentuk sistem manajemen dan proses kerja yang lancar, transparan dan efisien antar lembaga pemerintah.

Dengan melihat definisi e-government dapat dilihat banyak manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari implementasi e-government yaitu;

a. Memberikan layanan dan informasi tanpa ada batasan waktu dan tempat. Dimana masyrakat dapat mengakses informasi serta layanan

tanpa harus terikat batasan waktu dan tempat. Informasi dan layanan disediakan 24 jam sehari, 7 hari seminggu dengan pencari informasi tidak harus datang secara fisik ke kantor pemerintah penyedia informasi dan layanan yang diperlukannya.

b. Memperluas jangkauan pemberian layanan dan informasi. Dengan menggunakan internet sebagai salah satu media penyampaian layanan dan informasi.

c. Memberikan layanan yang lebih berkualitas. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, layanan yang diberikan dalam bentuk elektronik dan multimedia (electronic form) bisa lebih menarik dan berkualitas dibandingkan layanan dan informasi yang berbasis kertas (*paper form*) saja.

d. Mengurangi total biaya administrasi dan waktu yang dikeluarkan oleh masyarakat. Informasi dan layanan dapat diperoleh oleh masyarakat dengan lebih gampang tanpa harus melewati berbagai meja birokrasi dan mengeluarkan banyak biaya administrasi untuk mendapatkannya.

e. Memberikan media pembelajaran terhadap masyarakat. Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memilih metode atau cara terbaik dan ternyaman yang dapat digunakan untuk memperoleh layanan dan informasi dari pemerintah.

f. Memberdayakan masyarakat sebagai mitra pemerintah didalam proses pengambilan kebijakan publik. Dengan *e-government* dapat dibuat media umpan balik (*feedback*) dari masyarakat dan pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan pendapat dan pandangan,

sehingga dapat mendorong terciptanya pelaksanaan pemerintahan yang demokratis.

Jadi dapat dilihat bahwa penerapan e-government atau penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di suatu daerah bukanlah merupakan suatu tujuan akhir, akan tetapi kesejahteraan dari masyarakatlah yang menjadi tujuan akhirnya. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari faktor-faktor seperti: kemampuan ekonomi dan daya beli, tingkat daya saing yang tinggi, indeks sumber daya manusia yang tinggi, serta akses informasi yang memadai. Sehingga penggunaan teknologi informasi dan komunikasi hanya merupakan wahana untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Electronic Government (biasa disingkat *e-government*) adalah mekanisme interaksi antara pemerintah dengan masyarakat melalui sistem informasi berbasis internet dan teknologi digital lainnya dengan tujuan memperbaiki mutu dan kualitas pelayanan public yang efisien, transparan dan efektif.

E-Government ialah pemakain ataupun penggunaan teknologi informasi yang akan meningkatkan hubungan diantara pemerintah dengan pihak-pihak yang lainnya. *E-government* dapat juga dikatakan sebuah kependekan dari elektronik pemerintah atau yang dapat dikenal dengan e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau juga pemerintah transformasi.

E-Government diterapkan untuk meningkatkan akses warga negara terhadap jasa-jasa layanan publik pemerintah, meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber informasi yang dimiliki pemerintah,

menangani keluhan masyarakat dan juga persamaan kualitas layanan yang bisa dinikmati, oleh seluruh warga negara. E-Government merupakan perkembangan baru dalam rangka peningkatan layanan publik yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sehingga layanan publik menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

4. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Salah satu indikator keberhasilan perekonomian adalah terciptanya system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Lembaga keuangan memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan pencapaian stabilitas sistem keuangan melalui pelaksanaan fungsi intermediasi.

Menurut World Bank (2010) terdapat setidaknya empat jenis layanan jasa keuangan yang dinilai vital bagi kehidupan masyarakat yaitu layanan penyimpanan dana, layanan kredit, layanan system pembayaran dan asuransi termasuk didamnya dana pensiun. Keempat layanan tersebut telah menjadi persyaratan mendasar yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Peningkatan akses keuangan bagi masyarakat menjadi masalah bersama yang memerlukan koordinasi lintas sektoral dengan melibatkan otoritas terkait, industri jasa keuangan dan kementerian atau lembaga lain.

Studi mengenai hubungan antara akses keuangan dan kemiskinan dilakukan oleh Honohan (2007,2008). Honohan (2007) membuat sebuah indikator akses keuangan dengan menggunakan data dari 160 negara.

Ukuran indicator akses keuangan yang digunakan adalah persentase jumlah penduduk dewasa yang menggunakan jasa keuangan formal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa akses keuangan berdampak signifikan pada penurunan tingkat kemiskinan. Selain itu, hasil penelitian ini menekankan kembali terhadap hasil penelitian lain yang mengungkapkan bahwa peningkatan akses keuangan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif atau *pro-poor*.

Burges dan Pande (2005) melakukan studi mengenai hubungan antara program pembukaan cabang *rural bank* di daerah dengan tingkat kemiskinan di India. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pembukaan cabang *rural bank* di daerah-daerah di India dapat menurunkan tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa peningkatan mobilisasi tabungan dan penyaluran kredit di daerah pedesaan akan mengurangi tingkat kemiskinan pada wilayah tersebut atau dengan kata lain terdapat adanya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah tersebut.

Fadun (2014) melakukan studi mengenai analisis tingkat inklusi keuangan sebagai alat untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan redistribusi pendapatan di Nigeria. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa inklusi keuangan merupakan salah satu alat yang efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan melakukan redistribusi pendapatan di Negara-negara sedang berkembang.

Brune *et.al*. (2011) melakukan eksperimen lapangan dengan sampel yang dipilih secara acak untuk mengevaluasi dampak dari penyediaan akses tabungan terhadap tingkat komitmen menabung serta penggunaan

input dan output pertanian dengan menggunakan metode *Randomized Control Trial* (RCT) di Malawi. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah 3.150 petani tembakau yang memiliki pinjaman di lembaga keuangan mikro. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan akses keuangan melalui komitmen menabung dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin di Malawi.

Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa akses keuangan menjadi syarat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi terutama di daerah. Akses ke layanan jasa keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, dana pension dan fasilitas pembayaran akan sangat membantu kelompok *marjinal* dan berpendapatan rendah untuk meningkatkan pendapatannya, mengakumulasi kekayaan, mengelola resiko, serta melakukan upaya untuk keluar dari kemiskinan.

Di sisi lain, industri jasa keuangan akan menjadi jantung bagi perekonomian yang dapat berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi dengan memobilisasi tabungan, menyediakan kredit untuk bisnis, dan akselerasi dunia usaha melalui penyediaan fasilitas seperti transfer dan pembayaran.

Ekonomi daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan kapasitas administrasi daerah, revitalisasi ekonomi desa dan penyediaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), sangat membantu dalam menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif untuk menggiatkan ekonomi daerah dan peran serta

masyarakat di daerah. Dalam konteks ini, percepatan akses keuangan di daerah menjadi sangat penting.

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) lahir sebagai forum koordinasi yang sangat penting bagi Pemerintah, pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam percepatan akses keuangan di daerah untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan mendukung kemandirian daerah.

TPAKD telah menjadi motor penggerak penguatan ekosistem perekonomian daerah melalui peningkatan akses keuangan. Tidak dapat dipungkiri, kondisi pandemic covid-19 yang terjadi saat ini juga telah membuat keberadaan TPAKD menjadi sangat penting khususnya dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi daerah.

Kementerian Dalam Negeri sangat mendukung terciptanya pencapaian program pemerintah Strategi Nasional (STRANAS) keuangan inklusif dan TPAKD ini antara lain dengan menerbitkan Radiogram Nomor T-900/634/Keuda ke seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota untuk membentuk TPAKD dan mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menganggarkan kegiatan yang diarahkan untuk mendorong pembentukan dan pelaksanaan kerja TPAKD dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), guna mencapai target indeks inklusif keuangan menjadi 90 % (Sembilan puluh persen) pada akhir Tahun 2024.

Kehadiran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) mempunyai tujuan antara lain untuk mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat melalui berbagai

inovasi dan terobosan baru guna mendukung perekonomian daerah, mendorong adanya aliansi strategi dan peran serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perwakilan kementerian/lembaga di daerah, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka perluasan akses keuangan di daerah, menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan dalam rangka pemerataan ekonomi dan kemandirian daerah, mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif untuk mengembangkan UMKM, usaha rintisan (start up business) dan membiayai pembangunan sektor prioritas serta mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan tingkat literasi dan inklusif keuangan di Indonesia.

Sejalan dengan ini guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pencapaian inklusif keuangan di daerah serta pelaksanaan TPAKD maka diperlukan beberapa hal dari stakeholder terkait antara lain:

a. Meningkatkan komitmen dan sinergi dalam implementasi program TPAKD meningkatkan ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat.
b. Memperkuat sinergi dalam upaya perluasan akses keuangan di daerah, khususnya melalui TPAKD dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
c. Mendukung implementasi program perluasan akses keuangan melalui TPAKD yang telah terbentuk dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah, serta memperhatikan keselarasan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah tahun berjalan dengan fokus yang ditetapkan pada program TPAKD.

d. Mendukung program perluasan akses keuangan dan Bersama seluruh anggota TPAKD bersinergi dengan perbankan dan lembaga jasa keuangan milik daerah mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah.

Dalam proses percepatan akses keuangan di daerah, TPAKD tidak hanya merupakan sebuah tim koordinasi melainkan pengembangan ekosistem keuangan inklusif di daerah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah beserta masyarakat sekitar.

Tujuannya membangun Seluruh anggota TPAKD yang terdiri dari pemerintah daerah, OJK, dan Bank Indonesia Bersama pemangku kepentingan lainnya mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terkait produk dan layanan keuangan. Selanjutnya, TPAKD bekerja sama dengan LJK yang ada di daerah menyusun program kerja yang sesuai kebutuhan masyarakat dengan berfokus pada optimalisasi produk dan layanan keuangan, penguatan infrastruktur, peningkatan literasi keuangan serta asistensi dan pendampingan.

Pemerintah daerah menyediakan informasi terkait data UMKM yang ada di daerah. Disisi lain, Bank Indonesia menyediakan sarana pendampingan bagi para UMKM untuk meningkatkan produktivitas usaha, sedangkan OJK menyediakan informasi terkait LJK yang dapat menyediakan layanan keuangan bagi UMKM dan masyarakat. Dalam

implementasinya, TPAKD menjadi motor penggerak dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan di daerah.

TPAKD memiliki peranan besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kerangka kerja TPAKD menempatkan beberapa *enabler* sebagai penggerak implementasi program kerja TPAKD. Seluruh program kerja akan dilaksanakan secara terukur dan berkelanjutan sejalan dengan indicator-indikator yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Kesuksesan pelaksanaan program kerja TPAKD didorong oleh 5 *enabler* yang terdiri dari pembuatan regulasi/kebijakan, komunikasi dan koordinasi, ketersediaan infrastruktur dan sumber daya, serta dukungan kelembagaan. Kelima enabler tersebut dapat mendukung program kerja TPAKD yang diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kelompok yaitu: optimalisasi produk dan layanan keuangan, penguatan infrastruktur akses keuangan, peningkatan literasi keuangan, serta asistensi dan pendampingan.

Pada implementasinya, progam kerja TPAKD dilaksanakan secara terukur dengan parameter capaian sesuai dengan target yang ditetapkan oleh masing-masing TPAKD. Dampak dan output program kerja TPAKD diharapkan secara langsung maupun tidak langsung dapat berkontribusi terhadap indicator penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan pengurangan kesenjangan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan memperhatikan bahwa inisiatif pembentukan TPAKD dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan percepatan akses

keuangan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, maka TPAKD berada di bawah pembinaan dan koordinasi Gubernur untuk tingkat Provinsi dan Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/kota. Keanggotaan TPAKD terdiri dari berbagai unsur seperti pemerintah daerah, regulator, Lembaga/instansi vertical terkait di daerah, LJK, asosiasi, dan akademisi. keanggotaan yang dimaksud adalah Kepala Perangkat Daerah yang menangani: (Pengelolaan Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Koperasi dan UKM, Perdagangan, Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Perindustrian, Sosial, Pendidikan, Ekonomi dan Pembangunan). Kepala Badan Pusat Statistik di daerah, Ketua Asosiasi LJK, Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Pimpinan LJK di daerah, Akademisi, Unsur Pemangku Kepentingan Lainnya.

Dalam pelaksanaan program kerja TPAKD dan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah pengembangan dan kebijakan TPAKD maka diperlukan adanya Roadmap TPAKD sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan program kerja dan operasional TPAKD. Roadmap TPAKD merupakan living document yang memuat visi dan misi serta rencana aksi TPAKD di tingkat pusat dan daerah. Visi TPAKD yaitu sebagai akselerator dalam rangka mendorong ketersediaan dan pemanfaatan akses keuangan formal sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan masyarakat di daerah guna pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan visi dimaksud terdapat 4 (empat) misi utama yaitu: Memperkuat infrastruktur dan peningkatan titik akses

keuangan di daerah, Memastikan keberlanjutan TPAKD untuk jangka Panjang, Memperkuat kapasitas anggota TPAKD dan peningkatan kinerja TPAKD, dan Mendukung percepatan target literasi dan inklusi keuangan. Visi dan misi TPAKD tersebut akan dijabarkan melalui berbagai program kerja dan rencana aksi yang mencakup seluruh produk dan layanan sektor jasa keuangan.

Melalui roadmap, para anggota TPAKD diharapkan juga dapat melakukan proses pemantauan dan evaluasi kinerja TPAKD di daerah masing-masing sesuai dengan kegiatan dan target pencapaian yang telah direncanakan. Perhitungan evaluasi kinerja TPAKD akan mengacu pada parameter yang telah disusun dalam roadmap, sehingga lebih terstandarisasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Inti dari roadmap TPAKD adalah langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi TPAKD, program, rencana kerja dan kegiatan yang tercantum dalam strategi yang diatur dalam jadwal pelaksanaan, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas di daerah, dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, kapasitas pelaksanaan TPAKD dan dukungan pemerintah daerah.

Sampai dengan saat ini, keberhasilan TPAKD khasususnya Provinsi Sulawesi Selatan dapat terlihat dari penghargaan yang diterima selama 2 tahun berturut-turut, dimana pada TPAKD Award tahun 2019 dan Tahun 2020 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Gubernur menerima Penghargaan dengan kategori Pola Kemitraan, hal ini tentu tidak lepas dari dukungan dan keterlibatan pimpinan daerah dalam menyusun dan mengevaluasi program kerja TPAKD, selain itu

koordinasi dan komitmen selutuh anggota TPAKD menjadi kunci keberhasilan TPAKD, serta program yang sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan ekonomi daerah yang dapat diimplementasikan.

B. Defenisi Konsep

Aspek- aspek KinerjaMenurut T.R Michel dalam Rizky 2001:15 meliputi :

1. Kualitas Kerja *(Quality of Work)*

Dalam rangka pencapaian target inklusi keuangan nasional yang ditetapkan sebesar 90% pada tahun 2024, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) secara aktif telah mengimplementasikan berbagai program kerja inklusi keuangan baik yang diinisiasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Program kerja dimaksud tentunya juga diharapkan dapat mendorong penguatan potensi unggulan di daerah dan selaras dengan program tematik TPAKD.

Berbagai program kerja yang dilaksanakan TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan antara lain adalah Fasilitasi Akses Keuangan Kepada UMKM Sektor Prioritas Binaan Pemerintah Daerah dengan Pola Kemitraan, Mendorong Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan, Fasilitasi Program Akses Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir, Mendorong budaya menabung sejak dini dengan target Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar), dan Mendorong percepatan akses keuangan melalui digitalisasi produk/layanan Keuangan.

Dari program kerja tersebut kualitas kerja TPAKD dapat dilihat dari pencapaian target dari setiap program kerja yang dilaksanakan oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, serta bagaimana kerja sama antar

stake holder yang terlibat dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, selain itu sinkronisasi program kerja TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan dan Program Kerja TPAKD Kabupaten/Kota menjadi salah satu variable penilaian kualitas kerja TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Ketepatan Waktu *(Promptness)*

Selama tahun 2020, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) telah berkontribusi secara aktif guna meningkatkan perekonomian daerah melalui berbagai program kerja, sebagai bentuk akuntabilitas dari capaian kinerja dan prestasi TPAKD, pada bulan Juli 2021, OJK telah menerbitkan Laporan Implementasi Program Kerja TPAKD Tahun 2020 yang memuat terkait perkembangan Implementasi Program Unggulan TPAKD yang telah diinisiasi dan dijalankan oleh TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan beserta TPAKD Kabupaten/Kota. Selain itu laporan tersebut memuat capaian yang telah dilakukan oleh TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan.

Sampai dengan tahun 2020, 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan telah membentuk dan mengukuhkan TPAKD, selama tahun tersebut juga telah dilaksanakan berbagai kegiatan oleh TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan antara lain peningkatan literasi dan inklusi keuangan dan penyusunan Generic Model Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir. Selain itu, pada tahun 2020 juga telah dilaksanakan Rakornas TPAKD 2020.

Selain itu pada tingkat daerah telah dilaksanakan berbagai program kerja seperti Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), dan Asuransi Usaha Tani

Padi (AUTP). Dokumen Laporan Implementasi Program Kerja TPAKD merupakan salah satu sumber informasi dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan program kerja literasi dan inklusi keuangan yang dilakukan oleh seluruh TPAKD sehingga ketepatan waktu penyampaian laporan ini sangat perlu dan menjadi variabel penilaian TPAKD AWARD.

3. Inisiatif *(Initiative)*

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah selama ini telah secara aktif mengimplementasikan berbagai program kerja inklusi keuangan, baik yang diinisiasi oleh Pemerintah pusat maupun daerah. Tujuannya untuk memperluas akses keuangan bagi UMKM di seluruh Indonesia dan mencapai target inklusi keuangan.

Keberhasilan TPAKD sendiri dapat ditunjukkan melalui implementasi program kerja yang berjalan dengan baik, sehingga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Menentukan tema program kerja merupakan salah satu tahapan dalam membuat penyusunan program kerja TPAKD. Tema memuat satu atau lebih program kerja yang memiliki kesamaan tujuan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan di daerah, selain itu menentukan program kerja sesuai kategori dan sasaran juga merupakan salah satu tahapan penyusunan program, yang mana program kerja harus selaras dengan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan yang mendukung penguatan infrastruktur.

Dalam menyusun program kerja TPAKD diperlukan inisiatif dalam mengambil langkah-langkah positif dalam menentukan program kerja

guna mencapai tujuan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan di daerah.

4. Kemampuan *(Capability)*

Program percepatan akses keuangan membutuhkan peran aktif dari pemerintah daerah dan stakeholders terkait, oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kemendagri serta institusi lainnya membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau yang biasa disingkat dengan TPAKD.

Dalam menjalankan program kerja dan mendorong percepatan akses keuangan daerah diperlukan kemampuan dan kerja sama seluruh anggota Tim Percepatan Akses Keuangan Daerahdengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat sekitarnya.

Selanjutnya, guna mempercepat pemulihan ekonomi daerah, Untung berharap adanya sinergi dan komitmen yang baik dan konsisten dari berbagai pihak dalam meningkatkan ketersediaan berbagai produk serta layanan keuangan formal. Sebagai contoh program kerja TPAKD yang dapat dilakukan adalah business matching, yang memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan modal pembiayaan usaha dengan produk layanan sebagai bagian dari bisnis usaha lembaga jasa keuangan. Kondisi tersebut akan menciptakan peluang ekonomi yang mendorong peningkatan kemampuan masyarakat dengan kapasitas dan kapabilitas yang lebih produktif untuk menghasilkan produk yang berkualitas.

Secara umum kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) membutuhkan kemampuan kerja sama dari anggota TPAKD baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dengan stake holders terkait. Tim

Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) tak henti-hentinya melakukan sosialisasi berbagai program kerjanya untuk menunjukkan eksistensinya.

5. Komunikasi *(Communication)*

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang penting dalam menjalankan proses administrasi dan interaksi antar elemen pada suatu organisasi atau lembaga, baik internal maupun eksternal. Tanpa adanya jalinan komunikasi yang baik dan benar, besar kemungkinan semua proses di dalam organisasi/lembaga tersebut tidak akan dapat berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Kemampuan komunikasi yang baik akan sangat membantu semua proses yang ada dalam suatu organisasi/lembaga. Berkomunikasi merupakan suatu kebutuhan hidup manusia. Dengan berkomunikasi manusia akan dapat berhubungan antara satu dengan yang lain, sehingga kehidupan manusia akan bermakna. Di sisi lain ada sejumlah kebutuhan dalam diri manusia itu hanya dapat dipenuhi melalui komunikasi dengan sesama. Makin banyak manusia itu melakukan aktivitas komunikasi antara satu dengan yang lainnya, akan semakin banyak informasi yang didapatnya dan semakin besar peluang keberhasilan seseorang itu dalam kehidupannya.

Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Komunikasi organisasi adalah proses penciptaan makna atas interaksi yang menciptakan, memelihara, dan mengubah organisasi.Struktur organisasi cenderung mempengaruhi

komunikasi, dengan demikian komunikasi dari bawahan kepada pimpinan sangat berbeda dengan komunikasi antar sesamanya.

Di dalam sebuah organisasi pemimpin adalah sebagai komunikator. Pemimpin yang efektif pada umumnya memiliki kemampuan komunikasi efektif, sehingga sedikit banyak akan mampu merangsang partisipasi orang-orang yang dipimpinnya. Dia juga harus piawai dalam melakukan komunikasi baik komunikasi verbal maupun nonverbal. Komunikasi verbal yang baik dapat dilakukan dengan menggunakan tutur kata yang ramah, sopan dan lembut.

Komunikasi non verbal dapat dilakukan dengan mengkomunikasikan konsep-konsep yang abstrak, misalnya kebenaran, keadilan, etika, dan agama secara non verbal misal menggunakan bahasa tubuh. Efektivitas organisasi terletak pada efektivitas komunikasi, sebab komunikasi itu penting untuk menghasilkan pemahaman yang sama antara pengirim informasi dengan penerima informasi pada semua tingkatan/level dalam organisasi.

Kelancaran semua kegiatan organisasi akan dapat terganggu jika terdapat suatu masalah yang menyangkut komunikasi dan apabila terjadi masalah dalam komunikasi maka di khawatirkan akan memberi dampak buruk bagi organisasi tersebut. Karena komunikasi ibarat sistem yang menghubungkan antar orang, antar bagian dalam organisasi, atau sebagai aliran yang mampu membangkitkan gairah kinerja orang-orang yang terlibat dalam organisasi tersebut.

Pentingnya komunikasi kepemimpinan dalam organisasi antara lain:

1. Menimbulkan pemahaman. Pemahaman dalam berkomunikasi ialah kemampuan memahami pesan secara cermat sebagaimana dimaksudkan oleh komunikator. Dalam hal ini komunikasi dikatakan efektif apabila mampu memahami secara tepat. Sedang komunikator dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan secara cermat.
2. Menimbulkan kesenangan. Kesenangan diartikan apabila proses komunikasi itu selain berhasil menyampaikan informasi, juga dapat berlangsung dalam suasana yang menyenangkan kedua belah pihak. Sebenarnya tujuan berkomunikasi tidaklah sekedar transaksi pesan, akan tetapi dimaksudkan pula untuk saling interaksi secara menyenangkan untuk memupuk hubungan antar pegawai.
3. Mengubah sikap. Pengaruh pada sikap dapat diartikan apabila seorang komunikan setelah menerima pesan kemudian sikapnya berubah sesuai dengan makna pesan itu. Tindakan mempengaruhi orang lain merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari di perkantoran. Dalam berbagai situasi kita berusaha mempengaruhi sikap orang lain dan berusaha agar orang lain bersikap positif sesuai keinginan kita.
4. Membina hubungan baik. Dalam proses komunikasi yang efektif secara tidak sengaja meningkatkan kadar hubungan interpersonal. Di lingkungan perkantoran, sering sekali komunikasi dilakukan bukan untuk menyampaikan informasi atau mempengaruhi sikap semata, tetapi sebaliknya kadang-kadang terdapat maksud implisit, yakni untuk membina hubungan baik.

5. Menghasilkan tindakan. Seorang komunikator memerlukan adanya mekanisme umpan balik sehingga mereka tahu apakah pesannya sudah dipahami oleh komunikan. Umpan balik yang dimaksudkan di sini adalah tindakan para komunikan setelah menerima pesan dari komunikator. Dalam hal ini penyerahan laporan hasil pelaksanaan tugas maupun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh bawahan dan pemberian saran pertimbangan dari bawahan pada saat pelaksanaan rapat koordinasi sebagai bahan perumusan kebijakan.
6. Mendorong saling percaya. Hal lain yang dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Budparpora adalah bahwa komunikasi itu dimulai dari suasana saling percaya yang diciptakan antara komunikator dan komunikan. Komunikasi yang diliputi rasa saling percaya antara atasan dan bawahan ditunjukkan dengan pemberian tugas dan tanggung jawab oleh atasan kepada bawahan serta pendelegasian wewenang kepada bawahan.
7. Memelihara *teamwork*. Organisasi merupakan tempat berkumpulnya orang-orang dengan tujuan bersama. Sama halnya dengan Dinas Budparpora Kota Sibolga, tujuan bersama itu ada, dan harus tetap dijaga agar pencapaiannya dapat diraih secara bersama pula.
8. Menghargai status dan peran. Arus komunikasi dari pimpinan ke bawahan selalu diupayakan agar tetap dalam koridor saling menghargai.

9. Pemberdayaan SDM. Komunikasi yang berlangsung dari pimpinan ke bawahan juga mempunyai maksud agar bawahan dapat bekerja dan berfungsi sesuai dengan minat dan kemampuan bawahan tersebut. Penempatan dan penugasan seseorang selalu didasarkan kepada latar belakang dan kompetensi yang dia miliki.
10. Menghemat waktu. Dengan memanfaatkan saluran komunikasi yang ada, serta tanpa melakukan penundaan penyampaian informasi dari atas ke bawah, maka waktu yang dibutuhkan untuk penyampaian pesan dan bagaimana agar pesan itu dipahami juga semakin singkat dan cepat.
11. Membangkitkan komunikasi. Tentu saja motivasi para pegawai harus terus ditingkatkan demi menjaga konsistensi kerja.
12. Menjalankan birokrasi. Sebagai organisasi formal, maka aliran informasi terutama sebelum mengeksekusi sebuah tindakan harus melalui beberapa tahapan sebelum tiba pada pengambilan keputusan.
13. Penyelesaian masalah. Pelaksanaan tugas-tugas di organisasi tidak lepas dari masalah. Namun penyelesaian masalah selalu dicoba ditangani dengan cara mengkomunikasikannya terlebih dahulu dengan pimpinan.

Demikian pentingnya komunikasi kepemimpinan dalam organisasi, seorang pemimpin harus meningkatkan kemampuan komunikasi yang efektif yang mencakup pemahaman komunikasi yang baik, iklim, budaya pendukung organisasi, dan perhatian yang baik dapat meningkatkan efektivitas komunikasi kepemimpinan dalam organisasi.

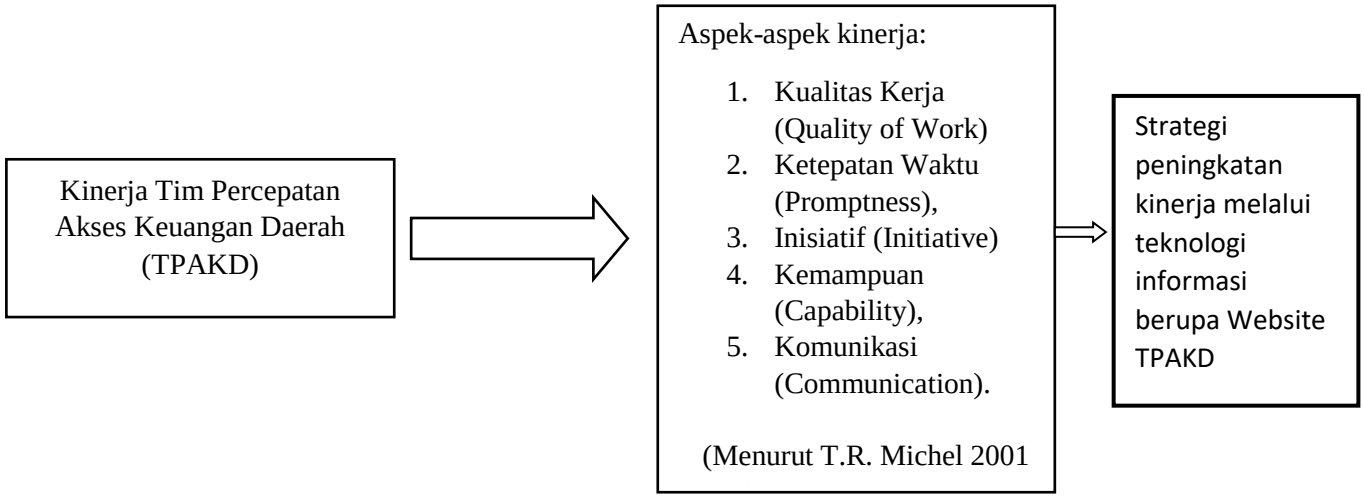
C. Kerangka Pikir

Berkaitan dengan topik permasalahan strategi peningkatan kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), serta untuk mempermudah pemecahan masalah dalam suatu penelitian ini diperlukan dasar pemikiran, alat ukur atau landasan dari penelitian yang disintetiskan dari fakta-fakta, observasi maupun kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka pikir memuat teori, dalil, atau konsep-konsep dari para ahli yang dijadikan dasar penelitian.

Keberhasilan suatu organisasi tergantung pada pencapain kinerja individual yang diharapkan, semakin baik kinerja individual yang diterapkan maka pencapaian kinerja organisasi semakin tinggi dan semakin terlihat.

Untuk lebih jelasnya kerangka pikir disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut :

Gambar 1 Kerangka Pikir



D. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian selalu diawali dengan munculnya masalah yang sering disebut sebagai fenomena atau gejala tertentu. Tetapi tidak semua masalah bisa diajukan sebagai masalah penelitian, ada beberapa yang menjadi pertanyaan penelitian yaitu:

1. Strategi apa yang dilakukan untuk peningkatan kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)?
2. Bagaimana strategi tersebut diaplikasikan dalam rangka peningkatan kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)?